

Konflik Pelayanan Publik di Oksibil

Thesman Deisaple¹, Supardal²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

Abstract:

The conflict on April 12, 2018 in Oksibil, on the 14th anniversary of the Bintang Mountains Regency, was only a trigger, because the main factor was the dissatisfaction of the community with the services provided by the regent because they had implemented a hierarchical government system and client patrons. In the sense that public services are oriented to groups close to the regent only, thus causing citizen dissatisfaction. For this reason, this study wants to describe the conflict caused by impartial service to the public. Research related to public service conflicts in Oksibil uses a qualitative method which also uses an exploratory descriptive approach. This research then analyzed and presented the data systematically which was then concluded based on the visible and relevant facts. The relevance of the data as it is by interviewing 17 (seventeen) informants from stakeholders of the Gunung Bintang Regency who were selected purposively. Data collection techniques with observations, interviews and documents, then the data were analyzed qualitatively and in depth. The results of the research on conflicts that occur between indigenous people and local governments who are migrants. So far, there is no openness and tends to be closed in policy making and public services in the Bintang Mountains Regency. Conflicts were also backed up by several political stakeholders, making it difficult to manage and resolve vertical conflicts that occurred in Oksibil.

Keywords: Conflict, Public Service, Indigenous People, Local Government.

Abstrak:

Konflik pada tanggal 12 April 2018 di Oksibil tepat hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Bintang yang ke-14 tahun itu hanya sebagai pemicu, karena faktor penyebab yang utama adalah ketidakpuasan warga masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh bupati karena telah menerapkan sistem Pemerintahan hierarki dan patron klien, dalam arti pelayanan publik berorientasi pada kelompok yang dekat dengan bupati saja, sehingga menimbulkan ketidakpuasan warga. Untuk itu penelitian ini ingin mendeskripsikan konflik disebabkan pelayanan yang tidak memihak kepada publik. Penelitian terkait konflik pelayanan publik di Oksibil menggunakan metode kualitatif yang juga digunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dan penyajian data secara sistematis yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan relevan. Relevansi data sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara 17 (tujuh belas) informan dari stakeholder Kabupaten Pegunungan Bintang yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan mendalam. Hasil penelitian terhadap konflik terjadi antar warga asli dengan Pemerintah Daerah yang merupakan pendatang. Selama ini tidak ada terbukaan dan cenderung tertutup dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Konflik juga dibackup oleh beberapa pemangku kepentingan politik, sehingga sulit dalam pengelolaan dan resolusi konflik vertikal yang terjadi di Oksibil.

Kata kunci: Konflik, Pelayanan Publik, Warga Asli, Pemerintah Daerah.

**Corresponding author: Thesman Deisaple*

E-mail address: thesmandeisaple5@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan sesuatu yang mengacaukan dan merusak tantangan sosial atau keharmonisan masyarakat umum, namun di sisi lain konflik akan membawa perubahan nilai positif bagi masyarakat atau institusi bahkan bagi kelompok pro dan kontra. Tetapi konflik

yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan konflik vertikal antara warga masyarakat pribumi dengan pemerintah Daerah yang sebagian besar orang pendatang.

Kaisupy dalam kajiannya menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Papua sudah cukup lama, yakni sekitar 50 tahun Papua berkonflik. Konflik vertikal yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yakni adanya gerakan yang menginginkan Kemerdekaan di tanah Papua dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu juga adanya isu rasial dan diskriminasi orang Papua di Malang dan Surabaya serta adanya atmosfer yang memanas terkait beroperasinya Freeport. (Kaisupy, 2021) Konflik tersebut tersebut berdampak pada pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah yang heterogen dengan latar belakang masyarakat yang beragam sehingga potensi konflik cukup tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah sepi dari berbagai konflik, disebabkan berbagai faktor baik jabatan, golongan, dan suku. Pada umumnya masyarakat berinteraksi baik antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok untuk menjalin hubungan yang harmonis. Namun demikian banyak diantara mereka salah memaknai interaksi sosial dan kebijakan yang ada di daerah sehingga tidak jarang akan menciptakan konflik secara vertikal.

Konflik dipahami sebagai suatu realitas sosial yang menunjukkan perbedaan-perbedaan antar individu, antar kelompok atau individu dan kelompok yang menciptakan kesalahpahaman dan kondisi yang berseberangan. Konflik terjadi dimana saja, termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang, dimana terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan layanan publik. Menurut Maharani adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Papua dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain ini menimbulkan adanya kecemburuan sosial yang ekstrim. Faktor ekonomi menjadi penyebab sekaligus faktor utama adanya kesenjangan ini yang menyebabkan warga Papua melakukan separatisme. (Maharani, 2021)

Konflik yang terjadi penyebabnya dapat sangat beragam, untuk konflik vertikal yang terjadi di Pegunungan Bintra penyebabnya seperti: Pertama pemimpin yang sangat eksklusif. Kedua, adanya hubungan yang tertutup dan saling curiga. Ketiga, jabatan di pemerintahan menjadi tujuan yang didambakan. Keempat, tujuan berpemerintahan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan. Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Assegaf dalam Sumartana, 2005: 35-37), Faktor lain karena adanya kelompok-kelompok kepentingan,

lembaga-lembaga organisasi, dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi (Surbakti, 1992:189).

Heterogenitas dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan konflik dimasyarakat, baik konflik agama ataupun suku dan lain sebagainya. Konflik karena heterogenitas terjadi di Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan secara umum bahwa keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial.

Konflik pelayanan publik warga asli dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil merupakan suatu bentuk protes masyarakat atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang memuaskan. Dalam kebijakan pemerintah daerah sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terkesan tertutup. Salah satunya adalah masyarakat melakukan protes dengan membakar panggung acara ulang tahun, merusak semua fasilitas acara, dan membakar rumah pribadi Bupati hingga lakukan pemalangan bandara Oksibil selama satu bulan. Dengan tuntutan pemerintah daerah hadir dalam hal ini Bupati Pegunungan Bintang harus memberikan penjelasan terkait kebijakannya selama 2 tahun kepemimpinannya yang tidak transparan kepada warga.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik vertikal warga asli dengan pemerintah daerah di Oksibil, mengetahui serta mendiskripsikan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian dampak konflik vertikal serta mendiskripsikan solusi penyelesaian konflik vertikal yang terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua.

METODOLOGI

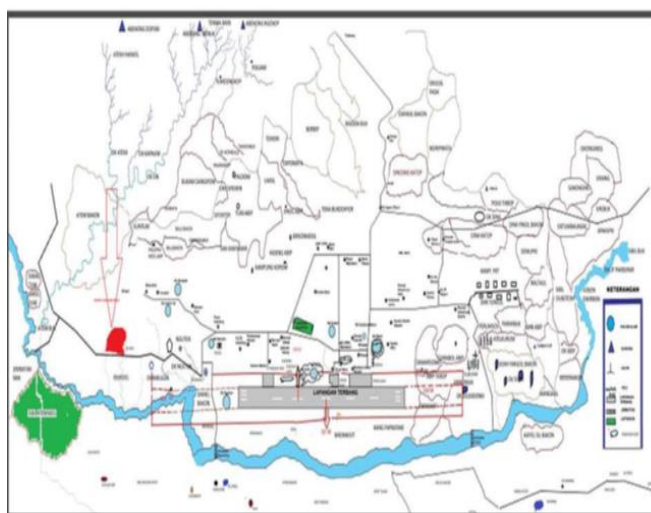
Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang berusaha mencari penjelasan faktor-faktor terjadinya konflik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan pendekatan ini peneliti akan menyajikan gambaran-gambaran secara umum (holistik) dalam menganalisis fenomena terjadinya konflik publik di Oksibil ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua. Objek penelitian adalah konflik

pelayanan publik di Oksibil, dengan melakukan wawancara 17 informan guna mengetahui apa penyebab dan bagaimana proses penyelesaian konflik pelayanan publik di Oksibil Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua. Dari data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam faktor-faktor penyebab konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki wilayah geografis yang mayoritas berada dipegunungan, serta masyarakatnya bertempat tinggal di wilayah lereng gunung yang terjal. Mereka juga hidup di lembah-lembah kecil dan satu sama lain terpecah tempat tinggalnya.

Gambar 1. Peta Profil Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang



Sumber: BPS Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki Ibukota di Oksibil yang sebelumnya menjadi wilayah dari Kabupaten Jayawijaya. Pembentukan Kabupaten ini berdasar pada berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 bersama 13 Kabupaten pada tanggal 11 Desember 2002. Pada awalnya Kabupaten Pegunungan Bintang hanya terdiri dari 3 distrik, yakni distrik Oksibil, distrik Kiwirok dan distrik Okbibab. Perkembangan Kabupaten Pegunungan Bintang cukup signifikan dengan berkembang dari 3 distrik menjadi 16 distrik dalam kurun waktu 16 tahun dan kemudian bertambah menjadi 34 distrik.. Dari 34 (tiga puluh empat) Distrik tersebut lokasi penelitian penulis adalah Distrik Oksibil. Distrik Oksibil merupakan Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Distrik tersebut, memiliki 8 (delapan) Desa /kampung yakni Aldombub, Okmakot, Kabiding, Banumdol, Kutdol, Molbib Silibib,

Polsam dan Mabilabol. Dari 8 (delapan) Kampung yang telah disebutkan di atas 3 (tiga) kampung menjadi wilayah penelitian yakni Okmakot, Mabilabol, dan Kabiding, serta terdapat 277 Desa/ Kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Konflik Pelayan Publik

Konflik disebabkan oleh beberapa indikasi tertentu yang terselubung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Bintang, salah satunya adalah dendam politik yang terus dipertahankan dan bertumbuh dalam masyarakat Asli dengan Pemerintah. Hal itu tentu berpengaruh indikator pemicunya konflik pelayanan publik warga asli dengan pemerintah daerah Pegunungan Bintang di Oksibil. Dendam politik yang terpelihara dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang juga terlihat jelas. Bahwa di dalam pelayanan pemerintahan tidak terbuka dan cenderung tertutup pelayanan pemerintah, dan pada akhirnya masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan pemerintah (wawancara dengan Costan Decky 12-12-2021).

Dendam politik seorang bupati terlihat pada kebijakan dalam mutasi jabatan yang tidak sesuai prosedur dan tidak menunjukkan nilai birokrasi hal itu sangat kontroversi dengan orang asli Pegunungan Bintang, bupati melakukan mutasi jabatan tidak sesuai prosedur, mutasi jabatan seharusnya pejabat bersangkutan minimal 2 tahun kerja atau maksimal 5 tahun kerja. Namun kebijakan dalam mutasi jabatan atau pergantian jabatan secara dadakan dan *menonjobkan* hampir semua orang asli Pegunungan Bintang tidak dapat kesempatan kerja di Oksibil Pegunungan Bintang. Sehingga terjadi konflik pada saat hari HUT Kabupaten Pegunungan Bintang itu merupakan bentuk kemarahan warga asli Pegunungan Bintang atas pelayanan pemerintah daerah. Sehingga sulit mengatasi pemerintah daerah sebab konflik tersebut diseting khusus oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian melakukan aksi di hari HUT Kabupaten Pegunungan Bintang yang 14 tahun pada tanggal 12 April 2018.

Ikrar Nusa Bakti menganalisis, menggambarkan, dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua dengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal disebabkan oleh berbagai aspek antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua situasi traumatis di antara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang-orang Papua serta kondisi sosio ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptis di antara orang Papua terhadap pemerintah (Nusa Bakti dkk, 2012). Dari pendapat ini faktor penyebab konflik utama di Papua adalah faktor kesenjangan ekonomi.

Solusi Konflik

Konflik di Oksibil mendapat respon yakni tuntutan warga untuk penyelesaian konflik adalah bahwa warga mengajukan tuntutan saat itu melalui ketua koordinator aksi Kris Bakweng Rubmabin meminta DPRD untuk degera melakukan sidang darurat dan bentuk tim pansus untuk melakukan permohonan mosi tidak percaya kepada kinerja bupati kepada Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Untuk kemudian dicopot jabatan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, tuntutan massa aksi demo sesuai dengan berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 76 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun hal itu tidak menghasilkan solusi.

Konflik pelayanan publik di Oksibil malah makin meluas, penanganan awal yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (POLPP), namun hal itu tidak mampu diatasi, sehingga aparat keamanan dalam hal ini Polresta Kabupaten Pegunungan Bintang mengerahkan anggota sekitar 2 pleton, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Namun hal itu tidak mampu diatasi, sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan minta bantuan kepada Polda Papua untuk mengirimkan pasukan Brimob, sehingga menurunkan Brimob 5 Pleton ke Oksibil. Hal itu ibarat pemerintah melibatkan masalah baru bagi masyarakat Pegunungan Bintang, sehingga aparat kepolisian dengan masyarakat Pegunungan Bintang terjadi bentrokan yang hebat, pada akhirnya 3 masyarakat sipil tewas ditembak polisi.

Dalam kondisi demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak hadir, lalu membiarkan konflik itu terus berjalan sendiri tanpa ada yang lakukan upaya-upaya pendekatan resolusi konflik, untuk menyelesaikan konflik vertikal tersebut. Padahal para massa unjuk rasa atau masa pendemo meminta pemerintah daerah untuk datang menjelaskan berbagai hal yang dituntut pendemo. Pemerintah daerah seolah-olah tidak peduli dengan konflik tersebut, karena ketika konflik itu terjadi bupati serta semua pimpinan OPD keluar daerah. Pemerintah daerah tidak melakukan pendekatan apapun untuk mencari resolusi konflik. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Dari wawancara dengan Kepala suku/ Ondo Api, Intelektual, dan masyarakat sebagai pelaku dan korban sebagai berikut:

“Pada dasarnya masyarakat Oksibil adalah masyarakat yang giat bekerja, memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap sesama dan menjunjung nilai agama kristen, karena masyarakat Oksibil mayoritas beragama Kristen, Katholik dan Islam. Dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat Oksibil jauh dari kata permusuhan dan pertikaian tetapi sangat cinta

damai. Budaya masyarakat Oksibil sangat menghormati orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. (Wawancara kepala Suku Oksibil, 27. Juni. 2021).

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Oksibil menjunjung tinggi nilai luhur dari budaya mereka, seperti nilai kekeluargaan, gotong-royong dan saling membantu. Selain itu mereka juga religius, dan menghormati pemerintah serta tokoh agama seperti Pemerintah Daerah, Kapolres, Dandim, Kepala suku, Ondo Api dan lainnya. Menurut pendapat tokoh tersebut bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat Oksibil sebelum menjadi ibukota kabupaten Pegunungan Bintang. Sebagaimana kehidupan masyarakat Oksibil dahulu tertutup dengan informasi-informasi perkembangan Negara, terutama informasi politik, dimana dahulunya daerah Oksibil sangat terisolir dari pelayanan Pemerintah Jaya Wijaya.

Masyarakat Oksibil keseharian mereka dahulu adalah selalu memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dari keseharian hidup masyarakat Oksibil, gotong royong yang paling sering dilakukan adalah memperbaiki jalan padat karya menghubungkan antara kampung, renovasi rumah masyarakat, acara gereja, dan acara-acara lainnya, dan gotong royong juga sering dilakukan pada saat adanya pesta pernikahan dan Natal dimana masyarakat akan membantu mendirikan tempat berkumpul dan beribadah yang biasanya masih menggunakan atap tradisional yaitu kayu buah sebagai tiang dan dedaunan sebagai atap. Pendapat lain disampaikan Pendeta Anselmus Taplo, (Ketua forum komunitas umat beragama) sebagai berikut:

“Sebelum terjadinya konflik masyarakat Oksibil ini memiliki karakter yang lembut, berbeda dengan masyarakat Papua lain yang tempramen dan kasar, mereka memiliki tingkat rasa toleran yang tinggi, pekerja keras mandiri dan nilai-nilai agama itu sangat mereka jaga dan menjunjung tinggi”. (Wawancara dengan Pendeta Anselmus Taplo, 15-12-2021)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Oksibil sesungguhnya memiliki sikap toleran dan terbuka kepada siapa saja boleh hidup dan berpemerintahan di Oksibil. Namun mereka tidak terima jika ada pemimpin yang ingin mengubah nilai-nilai kehidupan bersosial mereka dengan cara pelayanan tertutup cenderung otoriter tidak merata pelayanan publiknya sebagaimana tatanan kehidupan sosial mereka dahulu sebelum kabupaten itu hadir di Oksibil.

Menurut penulis, hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Oksibil sesungguhnya memiliki sikap ramah kepada siapa saja, sebab mereka lebih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Kristen sebagaimana diajarkan untuk melakukan hal baik

kepada siapapun. Sebab di daerah Oksibil lebih khusus dan pada umumnya daerah Papua dirintis oleh injil terlebih dahulu kemudian Pemerintah Hindia Belanda masuk dan setelah Indonesia merdeka lalu Indonesia masuk sehingga nilai-nilai luhur masyarakat Oksibil pasti baik dan toleran.

Sebagai ilustrasi munculnya konflik di Pegunungan Bintang juga bisa dipaparkan pendapat Ibnu Khaldun (dalam Hakimul Ikhwan Affandi, 2004) bahwa masyarakat berkembang dalam dua bentuk yaitu *pertama*, masyarakat pengembara atau berpindah-pindah (*Nomaden society*) dan *kedua*, masyarakat menetap (*sendentary society*). masyarakat pengembara di padang pasir hidup dari pertanian dan pemelihara binatang ternak. Kebutuhan mereka hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka membuat kemah dari bulu binatang dan wol, atau rumah dari kayu, lempung, dan batu selain itu mereka juga tinggal di lubang-lubang dan gua-gua. Kemudian masyarakat *Nomeden society*, ditandai oleh ikatan darah dan agama. Wataknya keras dan tegas, fisiknya kuat dan suka bekerja keras. masyarakat *nomaden* ini diikat oleh *Ashobiyah* yang kuat. Mereka merasa sederajat dan terdapat persamaan hak termasuk dalam pembagian sumber-sumber kehidupan. Mereka juga cinta kebebasan, berani, percaya diri, dan sederhana. Walaupun demikian, mereka juga kasar terbelakang, dan tidak disiplin.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, karakteristik kehidupan masyarakat kota Arab Al Madina, Latin Polis, tidak jauh beda dengan polah kehidupan masyarakat pegunungan Bintang di Oksibil Papua. Karena pada dasarnya awal kehidupan manusia Oksibil, dahulu kala hanya hidup dari hasil kebun, hasil berburu, dan binatang peliharaan selalu dijadikan pilihan utama dalam kehidupan bersosial mereka. Lebih khususnya dalam acara-acara tertentu selalu bergotong royong saling menjaga dan menghargai nilai-nilai budaya sesama suku-suku kecil di Oksibil, sebelum kabupaten Pegunungan Bintang itu hadir di Oksibil, ketika kabupaten itu hadir tatanan kehidupan dan keharmonisan nilai-nilai luhur hampir menurun bahkan di wilayah ibu kota sudah hilang total. Sehingga konflik pelayanan publik itu akan selalu terjadi di Oksibil sebab hari ini warga Oksibil mengharapkan pelayanan dasar yang prima dari pemerintah setempat, namun ketika tidak melakukan demikian akan berpotensi konflik pelayanan publik akan selalu terjadi di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ironimus Uropmabin, (Ketua Dewab Adat *Aplim Apom Sibilki*)

Iwol dipimpin oleh seorang kepala Suku (*Ngolki*). Kepemimpinan yang mereka perankan bersifat terbuka dalam satu *Iwol*, sehingga mereka yang dianggap memiliki keahlian atau keterampilan atau pengetahuan tentang bidang tertentu mendapat mandat untuk menjadi

seorang kepala suku (*Ngolki/Ngolkur*). Untuk menjadi Kepala suku tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan proses yang panjang dengan mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan upacara-upacara sakral inisiasi untuk dibentuk menjadi pribadi yang matang secara intelektual, emosional dan spritual. Mereka yang akan menjadi *Ngolkaer* akan kelihatan sikap dan sifat-nya sejak *awal* mulai *Ngolkaer* didik di *Iwol*, sehingga sejak dini para tokoh-tokoh dalam *Iwol* dapat melakukan transfer Masop (Pengetahuan dan Mantra) kepada calon kepala suku (*Ngolki/Ngolkur*) (Wawancara dengan Ironimus, 20 Juni 2021).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa, arti kepemimpinan orang Pegunungan Bintang suda punya pemerintahan yang suda terbentuk sejak manusia diciptakanya yaitu kepala suku yang pimpin masyarakat melalui wadah *Iwol*, sehingga pemerintahan yang modern tidak sesuai norma-norma mereka pasti menimbulkan konflik. Salah dalam pengambilan kebijakan, keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan harus jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan Bupati Costan Oktemka:

Saya sebagai Kepala Daerah tidak tahu pemicu konfliknya kenapa saat itu, kami Pemerintah sebagai fasilitator suda menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Mungkin panitia saja teknisnya bagaimana harus lakukan, persiapan kesiapan yang baik tapi ya bagaimana lagi yang mereka siapkan teknis dan isi acaranya. Sehingga bisa menyebabkan konflik yang sulit diatasi. Di daerah pegunungan pada umumnya dan pada khususnya di Oksibil ini seharusnya panitia harus pahami kebiasaan mereka bagaimana, apa yang disenangi oleh mereka itu yang dilakukan supaya terlihat masyarakat senang dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga tidak menimbulkan konflik seperti hari itu terjadi di Oksibil, sebab di daerah ini sangat identik dengan balas dendam, sehingga momen konflik seperti itu bisa dimanfaatkan pihak lain. Hal itu yang terjadi di konflik di Oksibil namun ya kami sebagai pemerintah diam saja biarkan rakyat yang menilai, tetapi konflik ini justru masyarakat terlibat dalam pola atau pergerakan yang dimainkan oleh pihak lain dalam hal ini pihak berkepentingan. Untuk memperoleh kekuasaan kedudukan, lalu memanfaatkan masyarakat menyalahkan Pemerintah hingga 3 bulan lamanya sampai berakhir korban jiwa dan ada yang terluka. (Wawancara dengan Bupati, 21 juni. 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka dapat dijelaskan bahwa, konflik pelayanan publik warga asli dengan Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang yang terjadi di Oksibil, dikarenakan kesalahan teknis dalam penentuan tempat *finish*nya para peserta jalan santai. Dalam rangka menyambut hari HUT Kabupaten

Pegunungan Bintang yang ke 14 pada tanggal 12 April tahun 2018. Konflik tanggal 12 April tahun 2018 hanya sebagai awal pemicu saja untuk memprotes warga atas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kurang lebih 2 tahun yang notabe tertutup dan tidak berjalan baik. Sehingga konflik tersebut diakomodir oleh beberapa aktor politik dan bekas pejabat struktural dan fungsional yang sudah lengser dari pemerintahan Costan Oktemka dan Decky Deal, (CODE) periode 2015-2019 sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Sehingga konflik tersebut menjadi konflik vertikal yang berlangsung (3) bulan dan tidak menghasilkan solusi apapun juga, justru konflik tersebut berujung berakibat korban jiwa.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan.

Menurut Yulia Sagandi status yang dimiliki oleh anak-anak di Papua sebagai penduduk asli merupakan kata kunci dalam membangun identitas, melestarikan dan memberdayakan masyarakat asli Papua. Dalam berbagai metode tentang pembangunan studi etnografi dengan pendekatan sosial budaya menjadi bagian yang penting untuk dibahas. Hal tersebut mampu menjawab pembangunan yang ada di Papua. Studi sosial budaya mampu menjelaskan tentang pengakuan terhadap penduduk asli yang berkaitan dengan hak adat, hak ulayat dan kebudayaan. Pembangunan dengan pendekatan modernis terkadang kurang cocok jika diterapkan di Papua (<https://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/06393.pdf/> diakses 12/05/22).

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa, pengakuan pemerintah atas status dan kedudukan anak asli atau warga asli Papua di setiap daerah di Provinsi Papua termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil, sehingga tidak terjadi konflik vertikal. Yang sebagaimana terjadi konflik vertikal di Oksibil itu akibat dari pemerintah daerah tidak mengakui dan tidak melakukan pelayanan publik secara baik dan benar kepada warga asli Pegunungan Bintang Papua. Sehingga terjadilah konflik vertikal di Oksibil Pegunungan Bintang Papua.

Alternatif terakhir pusat menetapkan kebijakan Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU. No. 21 tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Papua yang menempatkan Papua “sedikit” lebih istimewa dibandingkan daerah lain yang mendapatkan kewenangan serupa melalui UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut seakan tak

cukup. Konflik masih membara dan butuh penyelesaian yang komprehensif untuk menuju Papua damai, Papua sebagai bagian integral dari Indonesia (Anugrah, 2019).

Dengan demikian akar permasalahan konflik di Papua banyak faktor, sehingga sekalipun berbagai alternatif solusi ditawarkan konflik terus terjadi, Menurut wakil bupati bahwa berkaitan konflik sebagai berikut:

Kami sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Bintang benar kaget dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kami sebagai pemerintah Daerah berusaha meredakan konflik yang sedang berlangsung tapi sangat sulit, sebab ada kelompok atau pihak yang suda merancang sejak kami dilantik dan memulai berpemerintahan. Sehingga kelompok ini memanfaatkan kesempatan itu, dan masyarakat menjadikan objeknya untuk memperoleh apa yang diimpikanya. Itu dugaan kami saat itu sebab banyak pihak yang tidak terima dengan kebijakan kami, saya sebagai wakil kepalah Daerah mencoba meredakan para masa unjuk rasa itu namun saya diminta untuk meninggalkan lapangan dan menyuru saya pulang. Saat itu masyarakat tidak menerima saya sebagai wakil bupati tapi mereka anggap saya koleganya mereka, sehingga saya berpendapat bahwa ada *kong kali kong* antara masyarakat dengan pihak berkepentingan, sebab dari masyarakat tau pengambilan keputusan semua dilakukan oleh saudara bupati. Sedikit memahami kinerja pemerintahan berarti dugaan kami sangat kuat bahwa ada pihak yang sedang memanfaatkan masyarakat Oksibil. (Decky Deal, (Wakil Bupati). 21. Juni. 2021)

Jadi menurut Decky Deal sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, dapat menjelaskan bahwa, konflik masyarakat asli dengan pemerintah daerah, Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi di Oksibil, berawal dari masalah sepele dalam hal ini teknis penempatan finishnya para peserta jalan santai keliru tempat finishnya yang ditentukan oleh panitia HUT kabupaten kemudian para pejalan santai di arahkan oleh panitia ke lapangan sepak bola Kabiding, sehingga terjadilah pertentangan antara panitia HUT dengan para peserta maka ada unsur kesengajaan pihak bekepentingan. dengan para peserta maka ada unsur kesengajaan pihak berkepentingan, berikut Penyebab konflik memang disebabkan oleh masalah kecil sepele tetapi kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu atau pihak berkepentingan. Sebab yang saya tahu disaat itu awal pertentangan peserta dengan panitia itu di halaman SOSKAT sana, tapi kemudian ada yang datang dengan jumlah yang lebih besar dan orang-orangnya juga bukan peserta jalan santai lagi. Lalu tuntutan pun menjadi bedah dan topiknya juga bedah sehingga saya sebagai pimpinan OPD, menaru curiga bahwa ujukrasa itu dipimpin atau dibekap oleh

pihak lain atau pihak berkrpentingan. Kemudian massa menuntut bupati hadir dalam konflik itu dan beri penjelasan atas tuntutan mereka sebagai berikut:

1. Meminta bupati mengeluarkan anggaran untuk acara bakar batu sebagaimana budaya di Oksibil, tidak terima makanan bungkus.
2. Meminta bupati untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang cenderung tertutup dan rahasia.
3. Meminta bupati untuk tidak mencopot jabatan tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur.
4. Apabila bupati tidak hadir dan tidak melakukan apa yang menjadi tuntutan masa aksi, maka bupati bersedia mengundurkan diri dari jabatan bupati.

Dari 4 poin di atas bupati tidak melakukan apa yang mereka minta sehingga tidak lama kemudian, masa membakar rumah pribadi bupati dan merusak segala fasilitas umum dan kios yang ada di kota Oksibil, dan terjadilah konflik berkepanjangan hingga 3 bulan lamanya, aktivitas pemerintahan pun lumpu total. (Wawancara dengan Selvi Oropka, (Kepala BPSDM. 22 juni. 2021). Dalam hal biaya studi dari pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebab masih terpelihara dendam politik di daerah, hingga di kota, studi di seluruh Indonesia. Sehingga konflik vertikal di Oksibil itu penulis berkesimpulan bahwa membawa malapetaka bagi kami anak putra daerah Pegunungan Bintang. Dua suku besar *Kupel Ngalum Negeri Aplim Apom* memiliki krisis pemberdayaan, pengembangan, dan daya saing. Seakan tidak ada pemimpin yang memiliki loyalitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pegunungan Bintang provinsi Papua.

Penulis menemukan pemerintah Pegunungan Bintang tidak melakukan pelayanan dasar wajib pemerintah daerah sebagaimana menurut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Hakikatnya warga merasa tidak puas dengan kinerja Bupati Pegunungan Bintang yang sangat patrol klien dan dinasti tidak merata pengisian jabatan tinggi pemerintahan Kabupaten

Pegunungan Bintang semua diisi oleh keluarga dan partner politiknya, sehingga dalam konflik vertikal pelayanan publik tersebut dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan dalam hal ini, dendam politik, kekuasaan, jabatan kedudukan, dan lainnya. Aktor-aktor ini adalah para lawan politik dan bekas-bekas pejabat tinggi fungsional dan structural yang suda lengser sejak era pemerintahan CODE. Sehingga hari ini di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang masih bentuk kubu pro dan kontra pemerintah masih terus berlaku hingga hari ini. Sehingga hari ini kami sebagai anak putra daerah Pegunungan Bintang tidak memiliki hak yang sama dalam pelayanan Pemerintah khususnya dalam pembiayaan studi di luar Papua maupun di Papua.

SIMPULAN

Penelitian terkait konflik pelayanan publik di Oksibil menyimpulkan berdasarkan data yang telah dianalisis bahwa: Konflik pelayanan publik warga asli dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil, merupakan bentuk kemarahan dan protes warga asli atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan dasar yang tidak berjalan di era Pemerintahan (CODE) selama kurang lebih 2 tahun sejak dilantiknya tidak memberikan pelayanan warga yang baik. Konflik pada tanggal 12 April 2018 di Oksibil tepat hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Bintang yang ke 14 tahun itu hanya sebagai pemicu untuk protes kebijakan Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang yang selalu tertutup dan menerapkan pemerintahan hierarki dan patron klien. Konflik pelayanan publik warga asli dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua merupakan konflik vertikal. Namun Konflik tersebut *dibackup* oleh beberapa pemangku kepentingan politik dan jabatan sehingga sulit dalam pengelolaan dan resolusi konflik vertikal yang terjadi di Oksibil itu. Dalam resolusi dan penanganan konflik pelayanan publik warga asli dengan pemerintah daerah kabupaten pegunungan bintang, terdapat kesulitan untuk negosiasi dari pihak manapun sebab warga selalu menyatakan resistensi untuk tidak menerima negosiasi dari pihak manapun kecuali Costan Oktemka bersedia turun dari jabatan bupati namun konflik tetap terjadi tanpa solusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boy Anugerah, 2019, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 40 | Desember 2019
- Dean, G, Fruitt, 2009, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka, Pelajar, Yogyakarta

- Delvia Ananda Kaisupy, 2021, PROSES NEGOSIASI KONFLIK PAPUA: DIALOG JAKARTA-PAPUA, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , Vol. 10 No. 1 (2021)
- Fariied Ali, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadi, R. P. 2017. Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *Transformasi Global*, 4(1).
- Hadi, S. 2007. Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, R. P. 2017. Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *Transformasi Global*, 4(1).
- Hadi, S. 2007. Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional. Yayasan Obor Indonesia.
- Hakimul Ikhwan Affandi, 2004, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta,
- Ikrar Nusa Bhakti, Natalius Pigay, 2012, MENEMUKAN AKAR MASALAH DAN SOLUSI ATAS KONFLIK PAPUA : SUPENKAH?, *Jurnal Penelitian Politik*, Home > Vol 9, No 1 (2012)
- Inu Kencan Syafiie, 2017, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jr. Martin Luther King.2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Mustika Maharani, 2021, Analisis Masalah Pada Konflik Papua Merdeka Dalam Kaitan dengan Kesenjangan Sosial Warga Indonesia , *Jurnal Penelitian Homaniora*, Vol. 1 No. 4 (2021): April
- Ngatiyem. (2007). Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia). Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
- Sumartana, Th. 2005. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 1992. “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: PT. Grasindo
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 21/03/22.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 21/03/22.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten./21/03/22.
- <https://pemerintah.net/pemerintah-Daerah.> (diakses,17/3/22)
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5883417/3-faktor-penyebab-terjadinya-konflik-di-masyarakat.>(diakses,17/3/22)
- <http://e-journal.uajy.ac.id/10459/3/2MIH02104.pdf> (30/3/22/05:40)
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/>. 22/3/22
- <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf>/12/05/22